



Bank Dunia Mempercepat Pengembangan Batubara di Indonesia

September 2013

Ringkasan

Pada bulan Juli, Kelompok Bank Dunia menerbitkan Kertas Arahan Sektor Energi, dimana Bank Dunia berjanji untuk membatasi pinjaman untuk batubara hanya untuk keadaan-keadaan khusus – atau hanya kepada negara-negara tanpa alternatif yang memungkinkan selain batubara. Agar janji ini mempunyai arti, Bank Dunia harus segera menghentikan dukungan aktifnya terhadap pengembangan batubara besar-besaran di Indonesia. Program infrastruktur Bank Dunia di Indonesia menetapkan kebijakan dan subsidi untuk pemerintah yang mempromosikan pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara lebih dari 16 GW sebelum mengembangkan alternatif energi terbarukan.

Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (Dana Jaminan Infrastruktur Indonesia, IIGF) yang diciptakan dan didukung secara finansial oleh Bank Dunia memberikan jaminan pemerintah pertamanya sebesar 33,9 juta dolar Amerika Serikat untuk Proyek PLTU Batang di Jawa Tengah, proyek tenaga batubara ultra-super critical yang akan menghasilkan listrik sebanyak 2000 megawatt. Bank Dunia menyatakan bahwa penjaminan ini sangat penting untuk mendapatkan pendanaan infrastruktur jangka panjang. Lebih lanjut Kelompok Bank Dunia berlaku sebagai penasihat transaksi untuk megaprojek batubara ini, peran dimana Bank Dunia mengatur pendanaan proyek dan mempromosikannya kepada para investor dan mendukung ekspansi proyek untuk menjadi salah satu proyek PLTU batubara terbesar di Asia Tenggara.

Proyek batubara besar ini telah memicu perlawanan lokal termasuk tuntutan hukum dan protes berulang kali yang dilakukan oleh ribuan penduduk lokal yang berujung pada bentrok disertai kekerasan dengan pihak keamanan proyek dan militer. Masih ada waktu bagi Bank Dunia untuk melakukan hal yang benar dan menghentikan proyek PLTU batubara kotor ini serta kemudian menghentikan dukungan Kelompok Bank Dunia pada pengembangan batubara secara umum. Pada tanggal 6 Oktober 2013, pendanaan proyek akan berlanjut bila tidak dihentikan misalnya dengan dibatalkannya penjaminan pemerintah.

Untuk menghindari terjebaknya Indonesia dalam masa depan yang kotor dan merusak iklim akibat penggunaan batubara dan membuat janjinya dalam Arahan Energi untuk membatasi pendanaan batubara hanya sebagai lelucon, Bank Dunia seharusnya:

- **Menarik dukungannya terhadap Proyek PLTU Batang, Jawa Tengah dan menuntut Pemerintah Indonesia untuk membatalkan penjaminannya terhadap proyek ini.**
- **Menetapkan bahwa pengecualian-pengecualian pajak untuk investasi infrastruktur yang diinisiasi Bank Dunia serta penjaminan dan pendanaan pemerintah tidak berlaku untuk proyek-proyek bahanbakar fosil.**
- **Mendampingi Pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan pengembangan alternatif, terutama sumberdaya-sumberdaya panasbumi penting, dibandingkan proyek-proyek bahanbakar fosil.**

- **Memastikan bahwa pembatasan pendanaan batubara dalam Kertas Arahan Energi komprehensif dan berlaku untuk segala bentuk dukungan Kelompok Bank Dunia, termasuk pinjaman kebijakan pembangunan, perantara pendanaan, dan jasa penasihat.**

Latar belakang

Beberapa penilaian global baru-baru ini menunjukkan bahwa laju dan tingkat perubahan dalam sistem iklim kemungkinan lebih besar dari yang ditunjukkan lima tahun yang lalu, dengan demikian makin mendesaknya kebutuhan untuk membawa dunia ini ke jalur pembangunan yang benar-benar rendah karbon. Sementara, banyak negara terus memerangi tantangan akses energi untuk penduduk miskin, termasuk Indonesia dimana tingkat rasio elektrifikasinya hanya 73 persen.ⁱ Namun, Kelompok Bank Dunia terus gagal untuk mendemonstrasikan pendekatan pembangunan rendah karbon, atau mengambil pendekatan efektif untuk meningkatkan skala akses terhadap energi bagi penduduk miskin dunia, sebagaimana yang dilakukannya saat ini di Indonesia.

Tenaga batubara memperburuk perubahan iklim dan bukan cara paling efektif untuk mengatasi kemiskinan energi.ⁱⁱ Tapi, bukannya membantu Indonesia untuk mengurangi atau memperlambat pengembangan batubara, Kelompok Bank Dunia malah berada di garis depan untuk memungkinkan percepatan dan perluasan tumbuhnya penggunaan batubara dengan mendukung diciptakannya skema investasi dan perantara pendanaan yang memberikan insentif dan subsidi untuk pembangunan batubara. Selanjutnya Kelompok Bank Dunia telah memegang peran sentral dalam memajukan Proyek PLTU Batang, Jawa Tengah, salah satu proyek PLTU bertenaga batubara terbesar di Asia Tenggara meskipun ditengah kuatnya penolakan lokal termasuk terjadinya bentrok antara keamanan proyek dan penduduk desa yang protes.

Sejak 2006, Pemerintah Indonesia telah mengejar program percepatan infrastruktur energi, dengan nama *Fast Track I*, dengan menargetkan lebih dari 16 GW tenaga listrik bertenaga batubara. Pada tahun 2010, pemerintah mengumumkan fase kedua program ini yaitu, *Fast Track II*, untuk mengembangkan tambahan energi yang dibangkitkan sebesar 10 GW. Selain proyek-proyek PLTU batu-bara, *Fast Track II* juga termasuk insentif dan proyek-proyek prioritas yang ditujukan pada energi panasbumi.ⁱⁱⁱ Master plan Pemerintah Indonesia untuk infrastruktur juga termasuk proyek untuk jaringan kereta api batubara dan pelabuhan yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor batubara Indonesia. Indonesia sudah merupakan eksporter batubara terbesar di dunia melampaui Australia pada 2011.^{iv} Meningkatnya ekspor batubara Indonesia mendorong ekspansi PLTU batubara di seluruh Asia, terutama di India dan Vietnam, yang sangat bergantung pada batubara Indonesia.

Pinjaman Kebijakan Pembangunan Bank Dunia dan Penengah Pendanaan di Indonesia Mendorong Penggunaan Batubara

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur Pemerintah Indonesia, termasuk program percepatan energi Fast Track, sejak 2007 Bank Dunia telah memberikan empat Pinjaman Kebijakan Pembangunan Infrastruktur (*Infrastructure Development Policy Loans*, IDPL) yang bernilai AS\$850 juta. Inti dari IDPL Bank Dunia adalah konseptualisasi dan dimulainya dua fasilitas pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pendanaan jangka panjang untuk proyek-proyek infrastruktur: Dana Penjaminan Infrastruktur Indonesia (*Indonesia Infrastructure Guarantee Fund*, IIGF) dan Fasilitas Pendanaan Infrastruktur Indonesia (*Indonesia Infrastructure Financing Facility*, IIFF).^{v,vi}

IIGF diberi mandat oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan jaminan bagi proyek-proyek infrastruktur di bawah skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS,*public-private partnership*). Dalam kasus pembangkit listrik, IIGF mendukung proyek-proyek Fast Track Pemerintah Indonesia. Penjaminan IIGF memberikan asuransi dengan biaya lebih rendah dan dengan tenor lebih panjang dibandingkan asuransi komersial.^{vi} Dengan menutup hampir semua risiko yang terkait dengan proyek-proyek infrastruktur dengan biaya lebih rendah, penjaminan IIGF dapat menjadikan proyek-proyek infrastruktur yang tadinya tidak laik secara finansial menjadi proyek-proyek menarik bagi investor swasta dan proyek yang bernilai kredit baik bagi bank.^{vii}

Walau modal IIGF sendiri terbatas, penjamin bersama (*co-guarantor*) dan fasilitas tersedia (*standby facility*) sebesar kira-kira 480 juta dolar Amerika Serikat memperluas jangkauan modal tersebut.^{ix} Selanjutnya, Bank Dunia juga menyediakan pinjaman 30 juta dolar Amerika Serikat kepada IIGF dan “pijakan untuk pelibatan lanjutan dalam pengembangan dan penaksiran/*appraisal* operasi infrastruktur PPP.”^x Contohnya, IIGF memiliki Nota Kesepahaman dengan Bank Dunia dan *Singapore Cooperation Enterprise* (SCE) untuk mengembangkan struktur tata kelola korporasi dan buku panduan operasi IIGF dan Nota Kesepahaman dengan MIGA Bank Dunia untuk mendukung IIGF dalam merampingkan kerangka kerja seleksi risiko (*underwriting*) dan pengelolaan risiko.^{xi}

Karena proyek-proyek energi Pemerintah Indonesia dalam *Fast Track I* sebagian besar merupakan PLTU batubara, tanpa perubahan signifikan dalam daftar proyek *Fast Track*, sejatinya pendampingan infrastruktur Kelompok Bank Dunia akan mempercepat pembangunan industri batubara. Se jauh ini, proyek-proyek *Fast Track I* yang didaftarkan sebagai “dalam pengembangan” termasuk 40 PLTU batubara dengan total 16,4 gigawatt.^{xii} Secara total, PLTU batubara merupakan 94% dari kapasitas energi yang dihasilkan oleh *Fast Track I*. Selanjutnya, proyek pertama yang menerima penjaminan IIGF pada Oktober 2011 adalah Proyek raksana PLTU bertenaga batubara di Batang, Jawa Tengah. IIGF juga telah memberikan penjaminan untuk Jalur Keretaapi Batubara Puruk Cahu-Bangkuang, sebuah proyek bernilai 3 milyar dolar Amerika Serikat, untuk jalur rel keretaapi sepanjang 385 km yang menghubungkan tambang batubara di sebelah utara Kalimantan ke pelabuhan Batanjung di bagian selatan Kalimantan.

Inisiatif yang dipromosikan Kelompok Bank Dunia Mendukung Proyek PLTU Jawa Tengah

IIGF yang didukung Kelompok Bank Dunia memberikan penjaminan 33,9 juta dolar Amerika Serikat untuk risiko yang terkait dengan proyek PLTU batubara senilai 4 milyar dolar Amerika Serikat tersebut. Penjaminan IIGF memberikan tenor 16 tahun untuk ekuitas dan 21 tahun untuk utang, tenor yang jauh lebih panjang dibandingkan yang diberikan secara komersial.^{xiii} Proyek PLTU Jawa Tengah adalah PLTU *ultra-super critical* berkapasitas 2000 megawatt di Batang, Jawa Tengah. Bila selesai, proyek ini akan menjadi salah satu PLTU batubara terbesar di Asia Tenggara. Mengingat ukuran proyek yang sangat besar, perlu bagi Kemenkeu untuk menambahkan IIGF tambahan penjaminan pemerintah.

J-Power dan Itochu Corporation dari Jepang dan Adaro Power dari Indonesia memenangkan tender kontrak 25 tahun untuk membangun, memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan (*build, own, operate and transfer*) fasilitas baru di Jawa Tengah ini. Proyek ini termasuk PLTU 2000 megawatt dan fasilitas transmisinya. Konsorsium ini telah mendapatkan pinjaman dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) untuk mendanai proyek bernilai AS\$4 milyar tersebut.^{xv} Tahap akhir pendanaan proyek ini,

yang menetapkan bahwa semua kesepakatan pendanaan ditandatangani dan semua persyaratan keuangan dipenuhi sebelum transfer dana dimulai adalah tanggal 6 Oktober 2013.

Kelompok Bank Dunia Bertindak sebagai Penasihat Transaksi untuk Proyek PLTU Jawa Tengah

Selain membuka jalan bagi penjaminan pemerintah bagi Proyek PLTU Jawa Tengah, yang merupakan kunci untuk memperoleh pendanaan proyek, Kelompok Bank Dunia merupakan pemeran kunci dalam memajukan proyek ini sebagai Penasihat Transaksi. Hibah diberikan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membayar jasa penasihat *International Finance Corporation* (IFC, unit sektor swasta Bank Dunia).^{xv} Sebagai penasihat transaksi, pekerjaan IFC termasuk:^{xvi}

- menganalisa landasan proyek;
- memberikan model pembiayaan proyek PPP;
- mempromosikan proyek kepada para investor dan mendapatkan umpan balik mereka;
- mempersiapkan kontrak PPP dan prosedur tender; dan
- mendampingi pelaksanaan tender dan menyeleksi pemenangnya.

Ringkasan Langkah-langkah Batubara Kelompok Bank Dunia di Indonesia

Operasi Bank Dunia	Tanggal Penyetujuan	Pendanaan* (AS\$ juta)	Bagian Operasi yang Berkaitan dengan Batubara	Mata Rantai Pengembangan Batubara
Pinjaman Kebijakan Pembangunan Infrastruktur I-IV	2007 – 2010	\$850	<p>Pinjaman ini memberlakukan Kerangka Kerja Investasi Kerjasama Pemerintah-Swasta (<i>Public-Private Partnership</i>, PPP) yang termasuk insentif/pegecualian pajak ganda untuk proyek-proyek energi, termasuk bahanbakar fosil (misalnya pembangkit listrik, transpor dan tambang).</p> <p>Pinjaman ini mendukung penciptaan Dana Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, IIGF) dan Fasilitas Investasi Infrastruktur Indonesia (Indonesia Infrastructure Investment Facility, IIF) yang memberikan subsidi pemerintah bagi proyek-proyek energi PPP.</p> <p>Pinjaman ini mendukung kenaikan tarif/cukai listrik yang mengurangi subsidi pemerintah bagi konsumen.</p>	<p>Program <i>Fast Track</i> Energi Pemerintah Indonesia (proyek-proyek PPP prioritas) – fase pertama termasuk 16 gigawatt batubara (94% pembangkit listrik berbasis batubara).</p> <p>PLTU Batubara Batang, Jawa Tengah (2.000 megawatt) dicanangkan sebagai model proyek PPP (lihat di bawah).</p> <p>Penjaminan IIGF memberikan jaminan kepada ekspor dan proyek pembangkit bertengaga batubara (lihat di bawah).</p> <p>Subsidi PPP untuk proyek-proyek bahanbakar fosil melemahkan komitmen G20 Indonesia untuk mengurangi subsidi bahanbakar</p>
Dana Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Indonesia)	September 2012	\$29 / \$480 [^]	IIGF memberikan penjaminan pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur dalam skema PPP.	Penjaminan IIGF memberikan jaminan bagi PLTU Batubara Batang, Jawa Tengah (AS\$33,9 juta) dan Jalur Keretaapi Batubara Puruk Cahu-

Infrastructure Guarantee Fund, IIGF)				Banguang untuk ekspor batubara. Meningkatnya ekspor batubara mendorong ekspansi di Asia, terutama India dan Vietnam , yang bergantung pada batubara Indonesia.
Penasihat Transaksi PLTU Jawa Tengah bertenaga batubara		Jumlah di luar anggaran yang tidak dipublikasikan	IFC (cabang sektor swasta Bank Dunia) menganalisis landasan proyek; mempromosikan proyek kepada para investor; dan menyiapkan kontrak PPP.	Di bawah nasihat Kelompok Bank Dunia, Jawa Tengah berkembang dari 800 megawatt menjadi 2.000 megawatt, salah satu PLTU terbesar di Asia Tenggara.

* Penting untuk dicatat bahwa jumlah pendanaan merepresentasikan total pendanaan untuk keseluruhan operasi, termasuk beberapa sektor dan langkah. Sulit untuk menentukan berapa dari jumlah pendanaan yang digunakan untuk pengembangan batubara. Angka ini diberikan sebagai indikasi skala operasi Bank Dunia.

^ Fasilitas *standby* Bank Dunia sebagai jaring pengaman IIGF.

Tidak ada Kriteria Batubara Kelompok Bank Dunia yang diberlakukan untuk Proyek PLTU Jawa Tengah

Seluruh kegiatan Kelompok Bank Dunia sekitar Proyek PLTU Jawa Tengah pada keseluruhannya menunjukkan keterlibatan yang setara atau lebih dari yang biasanya diberikan kepada proyek investasi langsung oleh Kelompok Bank Dunia. Walau demikian, karena Kelompok Bank Dunia telah masuk ke dalam proyek ini melalui pintu belakang, yaitu perantara pembiayaan dan hibah di luar anggaran untuk asistensi teknis, megaprojek batubara ini tidak harus memenuhi kriteria Kelompok Bank Dunia untuk pinjaman batubara, termasuk dipertimbangkannya energi alternatif, internalisasi biaya karbon, dan mengoptimalkan efisiensi energi dan langkah-langkah konservasi.^{xvii} Pendekatan semacam ini juga mengakibatkan kurangnya pengkajian internasional dan transparansi dibandingkan yang biasanya dilakukan untuk pengembangan batubara yang didukung Bank Dunia.

Penentangan Lokal dan Kekerasan Mewarnai PLTU Batubara Jawa Tengah

Terdapat penentangan lokal yang kuat terhadap proyek PLTU Batang, Jawa Tengah oleh penduduk yang berkeras bahwa PLTU batubara akan merusak lingkungan dan mengancam penghidupan mereka. Selama lebih dari satu tahun, serangkaian protes telah dilakukan oleh ribuan penduduk yang menolak proyek.^{xviii} Proyek ini menghadapi tuntutan hukum yang dilayangkan penduduk setempat kepada Bupati Batang karena mengeluarkan kebijakan yang menerima pembangunan PLTU dan bertentangan dengan kebijakan lain, termasuk kebijakan yang melindungi Taman Nasional Laut. Para penduduk juga mengatakan bahwa proyek ini belum menerima izin lingkungan yang diperlukan untuk memulai konstruksi.

Kontroversi dan laporan kekerasan terhadap para pendemo juga terjadi. Pada tanggal 30 Juli, penduduk setempat dilaporkan telah dipukuli oleh keamanan proyek, militer dan polisi karena keterlibatan mereka dalam protes bersama sekitar 500 penduduk yang mencoba untuk menghentikan kegiatan konstruksi. Berita setempat melaporkan bahwa 17 penduduk terluka, termasuk 15 laki-laki dan 2 perempuan.^{xix} Permasalahan yang terkait dengan penentangan lokal dan penguasaan lahan telah menunda dimulainya proyek dan memundurkan tanggal dimulainya PLTU menjadi akhir 2017.^{xx}

Inisiatif Bank Dunia Memperluas Penggunaan Batubara di Indonesia

Alih-alih membantu membatasi produksi batubara Indonesia, inisiatif infrastruktur Kelompok Bank Dunia telah meningkatkan dukungan langsung dan besarnya pengembangan batubara. Proyek PLTU Batubara Jawa Tengah, yang menerima penjaminan IIGF, dan penjaminan Kemenkeu serta asistensi IFC sebagai Penasihat Transaksi, pada awalnya hanya merupakan proyek sebesar 600-800 megawatt untuk memenuhi permintaan energi Pulau Jawa. Pada tahun 2006 dalam KTT Infrastruktur di Bali, pemerintah meningkatkan proyek bermodel PPP ini menjadi 1.200 megawatt. Pada akhirnya proyek akhir yang ditawarkan dalam tender di bawah saran IFC meningkat menjadi 2.000 megawatt.

Pada bulan November 2012, Jalur Keretaapi Batubara Puruk Cahu-Bangkuang, yang menerima penjaminan IIGF, mengumumkan bahwa cakupan proyek telah diperluas untuk menyertakan tambahan jaringan jalur kereta ke Lupak Dalam sehingga tiga pusat batubara, dari sebelumnya hanya dua, akan dihubungkan dalam jaringan kereta. Jadi dengan bantuan Bank Dunia, negara eksporter batubara terbesar dunia ini akan semakin besar.

Kurangnya Dukungan Bank Dunia Untuk Energi Terbarukan

Selama lebih dari satu dekade, Indonesia telah mempublikasikan kesempatan untuk mengembangkan sumberdaya panasbumi yang sangat besar, yang diperkirakan mempunyai kapasitas membangkitkan tenaga sampai 28 gigawatt – atau 40 persen dari sumberdaya panasbumi dunia.^{xxi} Bank Dunia lambat dan tidak memberikan cukup dukungan untuk panasbumi.^{xxii} Dengan demikian, kapasitas panasbumi Indonesia sebagian besar masih belum tersentuh – hanya 1,2 gigawatt yang baru dikembangkan atau sekitar 4% dari potensi yang ada.^{xxiii} Pengembangan sumberdaya panasbumi penting untuk mendampingi Indonesia menuju jalur pembangunan rendah karbon karena tenaga panasbumi dapat secara langsung menggantikan batubara sebagai *base load* sumber tenaga listrik. Karena itu, Bank Dunia seharusnya mendampingi Indonesia untuk memastikan bahwa semua proyek panasbumi potensial dan semua energi terbarukan lainnya dikembangkan sebelum mengunci Indonesia dengan lebih dari 16 gigawatt tenaga batubara untuk 50 tahun ke depan. Penting untuk dicatat bahwa proyek-proyek panasbumi, termasuk yang didukung oleh Bank Dunia, dapat diasosiasikan dengan hasil negatif seperti penguasaan lahan yang tidak adil dan kerusakan lingkungan (misalnya deforestasi dan emisi gas sulfur). Dampak semacam ini harus diselesaikan secara hati-hati dan sepiantasnya. Selanjutnya dalam hal energi terbarukan, tidak ada usaha Bank Dunia untuk mendukung pengembangan tenaga surya dan tenaga angin di Indonesia.

Bank Dunia Meningkatkan Subsidi Bahanbakar Fosil untuk Investor Swasta

Penekanan utama dari program IDPL Bank Dunia adalah “dimulainya dan aktivasi kerangka kerja kebijakan dan institusi untuk transaksi-transaksi Kerjasama Pemerintah-Swasta (*Public Private Partnership*, PPP)”. Kerangka kerja investasi PPP memberikan insentif pemerintah (atau subsidi), termasuk: pengecualian pajak pertambahan nilai (PPN), pengecualian cukai impor, pengurangan tingkat pajak pendapatan, percepatan tingkat depresiasi, pengecualian pajak tanah, pengecualian pajak bangunan, pendampingan penguasaan lahan, dan penjaminan IIGF (seperti dijelaskan di atas). Ini adalah subsidi yang diberikan kepada investor swasta untuk sebagian besar proyek-proyek tenaga listrik apakah berbasis fosil atau energi terbarukan.

Dalam hal subsidi konsumen, program IDPL Bank Dunia telah berhasil mengurangi besaran subsidi dengan tujuan “menciptakan tambahan penghematan anggaran dan memperbaiki dasar keuangan sektor energi”. Di Indonesia, Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*, PSO) adalah subsidi harga konsumen dari anggaran yang menutup perbedaan antara biaya

persediaan dan kebijakan tarif/cukai untuk kategori konsumen yang berbeda. Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia memberlakukan peningkatan tarif listrik, yang berkisar mulai dari tidak ada peningkatan untuk pengguna berpenghasilan rendah dan 18 persen untuk kategori pengguna yang lebih tinggi.

Walaupun pengurangan subsidi harga yang ditargetkan secara baik dapat diterima, perbaikan ini dilemahkan oleh peningkatan subsidi bagi investor swasta dalam proyek-proyek batubara dan gas. Peningkatan penerimaan negara yang diantisipasi karena dikurangnya subsidi harga menjadi tidak berarti karena meningkatnya subsidi bagi investor. Lebih lanjut, subsidi pemerintah baru yang muncul akibat skema investasi PPP yang dirancang Bank Dunia melemahkan komitmen G20 Indonesia untuk secara bertahap menghilangkan subsidi bahanbakar fosil.^{xxiv}

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pinjaman kebijakan Kelompok Bank Dunia, perantara pendanaan, dan jasa penasihat di Indonesia telah memungkinkan percepatan dan perluasan pertumbuhan batubara di Indonesia dan, melalui ekspor batubara di seluruh Asia.

Program infrastruktur Bank Dunia di Indonesia mendukung proyek-proyek *Fast Track* pemerintah, dengan fase pertama yang terdiri dari lebih dari 16 gigawatt atau 94% pembangkitan tenaga listrik baru. Sebagai tambahan dari direncangnya skema investasi yang termasuk di dalamnya pengecualian-pengecualian pajak, rancangan program dan dukungan dana Bank Dunia mendukung dana pemerintah untuk memberikan jaminan bagi kemitraan publik-swasta (PPP) – penjaminan yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan pendanaan proyek jangka panjang.

Penjaminan pertama diberikan kepada Proyek PLTU Batang, Jawa Tengah, yang bila selesai akan menjadi salah satu PLTU batubara terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya, Kelompok Bank Dunia sebagai Penasihat Transaksi memimpin dengan menjaring investor untuk megaprojek batubara ini. Inisiatif-inisiatif Kelompok Bank Dunia ini mengunci Indonesia dalam masa depan yang intensif karbon – masa depan yang merusak iklim.

Inisiatif-inisiatif Kelompok Bank Dunia yang merusak iklim ini harus dihentikan. Agar janji Arahan Energi untuk membatasi pembiayaan batubara tidak hanya sekadar lelucon, Bank Dunia harus:

- **Menarik dukungannya terhadap Proyek PLTU Jawa Tengah dan menuntut Pemerintah Indonesia untuk membatalkan penjaminannya terhadap proyek PLTU ini dan Proyek Keretaapi Batubara Puruk Cahu-Bangkuang.**
- **Menetapkan bahwa kerangka kerja pengecualian-pengecualian pajak untuk investasi PPP yang diinisiasi Bank Dunia serta penjaminan dan pendanaan pemerintah tidak berlaku untuk proyek-proyek bahanbakar fosil.**
- **Mendampingi Pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan pengembangan alternatif, terutama sumberdaya-sumberdaya geotermal penting, dibandingkan proyek-proyek bahanbakar fosil.**
- **Memastikan bahwa pembatasan pendanaan batubara dalam Kertas Arahan Energi komprehensif dan berlaku untuk segala bentuk dukungan Kelompok Bank Dunia, termasuk pinjaman kebijakan pembangunan, penengah pendanaan, dan jasa penasihat.**

-
- ⁱ Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Indonesia. <http://www.esdm.go.id/news-archives/electricity/46-electricity/5720-rural-electricity-increases-the-national-electrification-ratio-to-72-95-.html>
- ⁱⁱ <http://priceofoil.org/content/uploads/2011/06/Access-to-Energy-for-the-Poor-June-2011.pdf>; dan <http://priceofoil.org/content/uploads/2010/12/EnergyforthePoor.pdf>
- ⁱⁱⁱ Program-program Fast Track adalah bagian dari MP3EI atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.
- ^{iv} World Coal Association <http://www.worldcoal.org/resources/coal-statistics/>
- ^v Misalnya, Aksi 6 dalam IDPL3: Penerbitan Peraturan Pemerintah yang menetapkan Dana Penjaminan, dan Aksi 7 dalam IDPL4: Ditetapkannya Dana Penjaminan, termasuk mempekerjakan manajemen senior dan rancangan prosedur operasi.
- ^{vi} Indonesia Infrastructure Finance (IIF) adalah kerjasama dengan Bank Dunia (WB), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan korporasi investasi Jerman DEG. Proyek IFC# 26443 PT Indonesia Infrastructure Finance Facility. Ekuitas AS\$40 juta, disetujui 24 Juni 2009. Proyek WB ID# P092218, Indonesia Infrastructure Finance Facility. Pinjaman AS\$100 juta, disetujui 24 Juni 2009. Proyek ADB ID: 42109-013: Indonesian Infrastructure Financing Facility Company Project. AS\$100 juta, disetujui 31 Maret 2009.
- ^{vii} Jangka waktu tenor untuk penjaminan adalah periode waktu dimana proyek dijamin dan dengan demikian membantu memperpanjang tenor pinjaman proyek, yang merupakan pembatasan bila tidak cukup panjang.
- ^{viii} Misalnya: penundaan atau kegagalan mendapatkan izin, perubahan dalam kebijakan atau undang-undang, kebijakan *offtake* (penjualan di masa datang) untuk BUMN dan pendapatan yang tidak dapat dikonversi menjadi mata uang asing. The Jakarta Post, Editorial: "Financing breakthrough". 18 Oktober 2011.
- ^{ix} OECD, 2012. *OECD Reviews of Regulatory Reform - Indonesia, Private-Public Partnership Governance: Policy, Process and Structure. Organization for Economic Co-operation and Development*, September 2012. <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Chap%206%20PPPs.pdf>
- ^x Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, Project ID# P118916, disetujui: September 2012. Proyek-proyek yang memenuhi syarat adalah yang dinilai oleh WB dan memenuhi kebijakan WB. Untuk mencegah bercampurnya pendanaan WB dengan modal IIGF, pinjaman WB akan dikeluarkan pada saat klaim diajukan dan dinilai sebagai dapat dibayarkan oleh IIGF untuk proyek IIGF yang didukung WB.
- ^{xi} MIGA adalah *Multilateral Investment Guarantee Agency* (Badan Penjaminan Investasi Multilateral) yang merupakan bagian dari Bank Dunia.
- ^{xii} Terdapat juga 2 proyek geotermal yang totalnya 440 megawatt (keduanya menerima penjaminan IIGF) dan 2 proyek gas dengan total 560 megawatt. PricewaterhouseCooper, 2011. *Electricity in Indonesia: Investment and Taxation Guide 2011*.
- ^{xiii} Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, 2012. *The role of IIGF for PPP projects development in Indonesia*. Presentasi untuk *PPP Days*, Jenewa, Februari 2012.
- ^{xiv} Pendanaan terdiri dari 20-30% ekuitas dimana 60% akan diberikan oleh investor Jepang, dan 70-80% utang, termasuk investasi asing. http://www.indii.co.id/news_daily_detail.php?id=4976
- ^{xv} Hibah ini dari Devco (*Infrastructure Development Collaboration Partnership Fund*), program multi-donor yang berafiliasi dengan *Private Infrastructure Development Group* yang didanai oleh Departemen Pembangunan Internasional Inggris Raya, Kementerian Luar Negeri Belanda, Badan Pembangunan Internasional Swedia, dan Badan Pembangunan Austria.
- ^{xvi} IFC, 2010. *IFC Advisory Service in Public-Private Partnerships: Lessons from Our Work in Infrastructure, Health, and Education*. International Finance Corporation, World Bank Group, 2010.
- ^{xvii} *Strategic Framework for Development and Climate Change (SFDC)* Kelompok Bank Dunia menetapkan enam kriteria spesifik yang harus dipenuhi sebelum Bank Dunia untuk memberikan dukungan bagi proyek-proyek tenaga batubara.
- ^{xviii} *Jakarta Post*, 2013. *Thousands oppose steam power plant establishment in Batang*. 3 September 2012. <http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/03/thousands-oppose-steam-power-plant-establishment-batang.html-0>
- ^{xix} *Mongabay Indonesia*, 2013. *Villagers clash with officials while rejecting power plant project drilling*. 30 Juli 2013. <http://www.mongabay.co.id/2013/07/31/warga-desa-bentrok-dengan-aparat-menolak-engeboran-proyek-pltu-batang/>
- ^{xx} *Jakarta Post*, 2013. *Protracted impediments hold back power plant expansions*, 23 April 2013. <http://www.thejakartapost.com/news/2013/04/23/protracted-impediments-hold-back-power-plant-expansions.html>
- ^{xxi} PricewaterhouseCooper, 2011. *Electricity in Indonesia: Investment and Taxation Guide 2011*. Catatan: Kurang lebih 13 GW dari perkiraan ini masih dianggap spekulatif. Juga lihat: http://awsassets.wwf.or.id/downloads/geothermal_report.pdf
- ^{xxii} Geotermal adalah fokus khusus Dana Teknologi Bersih Indonesia bernilai AS\$400 juta yang didanai bersama oleh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia.
- ^{xxiii} <http://www.scribd.com/doc/124882053/Presentation-on-German-and-Indonesia-Business-Forum-at-Bappenas-Jakarta-11-February-2012>
- ^{xxiv} Pernyataan Pemimpin G20 pada KTT Pittsburgh 2009, para 29; dapat diunduh di <http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html>